



# Politik Demokrasi Pancasila

Kelompok 6

# Kelompok 6: Politik Demokrasi Pancasila

1 Mochamad Taufik Ali Syech Ahmad  
2113191097

2 R. M. Luthfi Arbilly Ismail Poetra  
2113191074

3 Akbar Maulana M Tarumadoya  
2113191073

4 Ahmad Rizal Imaduddin  
2113191071

5 Isep Lutpi Nur  
2113191079

6 Irpan Ramdani  
2113191069

7 Joshua Dheary Butar Butar  
2113191065

8 Domingos Doutel Sarmento  
2113191068

# Materi yang akan Dibahas

1

Definisi Demokrasi Pancasila

2

Tujuan dan Fungsi Demokrasi Pancasila

3

Unsur Demokrasi Pancasila

4

Sistem Demokrasi Pancasila

5

Nilai Demokrasi Pancasila

# Politik Demorasi Pancasila



Apa itu Demokrasi ?

Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat. kata kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.

# Ciri Ciri Demokrasi

## *Politik Demorasi Pancasila*



Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala.



Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu, seperti; presiden, menteri, gubemur dsb.



Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan; sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa.



Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu



Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat (lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik dan media cetak, dsb).



Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum.

# Definisi Demokrasi Pancasila

---

*Politik Demokrasi Pancasila*

---

Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, memiliki kandungan berupa unsur-unsur kesadaran dalam berreligius, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur dan kecintaan, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia.

# Aspek Demokrasi Pancasila

## *Politik Demorasi Pancasila*

### Aspek Material

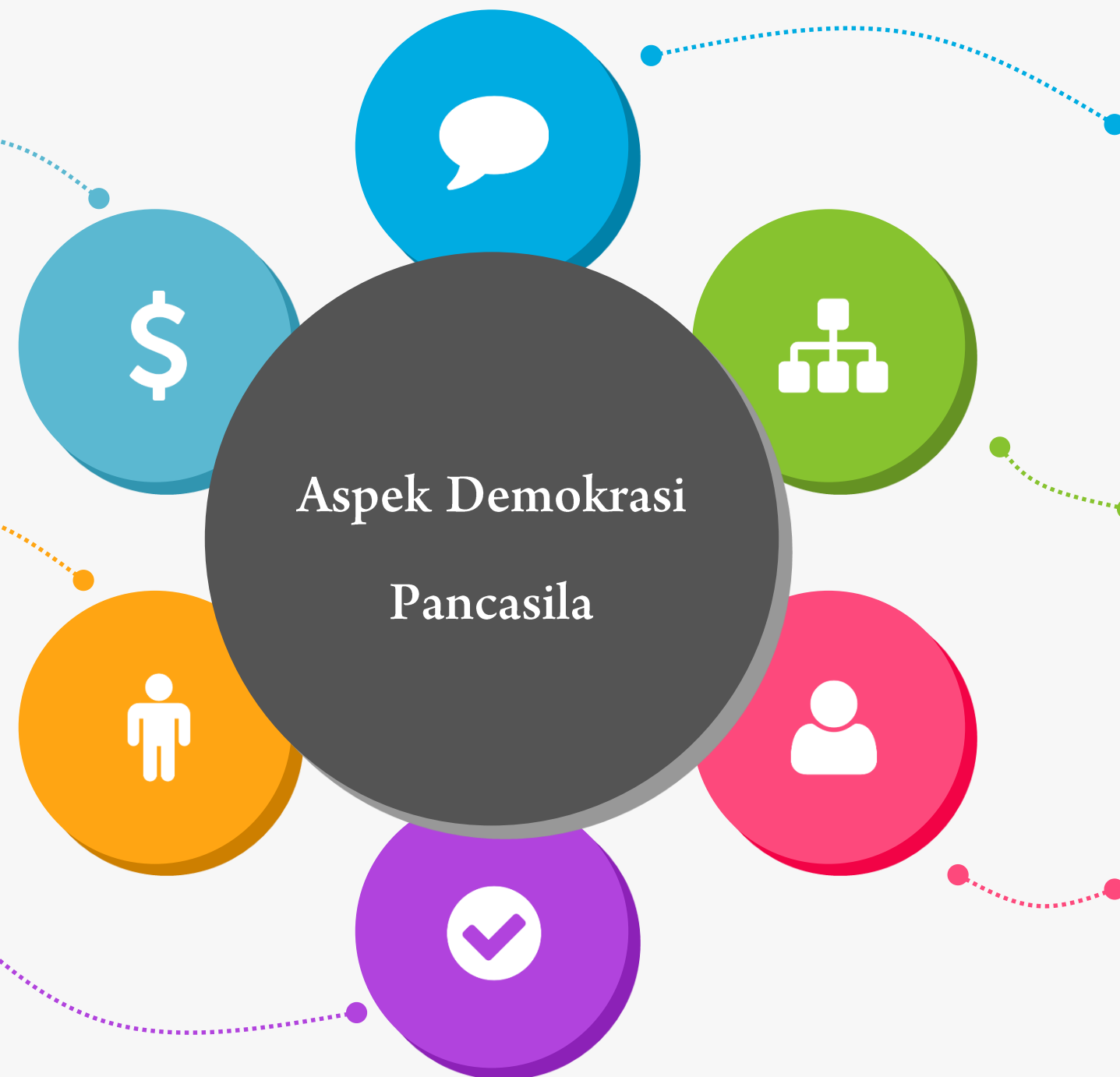
Aspek ini juga merupakan hal khusus yang harus dimiliki oleh suatu negara yang nantinya akan menjadi landasan dari negara itu sendiri

### Aspek Formal

Aspek ini merupakan aspek yang mengatur tentang proses dan cara-cara bagi rakyat Indonesia untuk menunjuk wakil rakyat yang nantinya akan berkedudukan di badan pemerintahan

### Aspek Normatif

Aspek normatif dalam demokrasi pancasila yaitu adalah aspek yang membedakan suatu kaidah yang nantinya akan membimbing serta juga memilih bagaimana yang akan menjadi kriteria agar tujuan negara dapat tercapai.



### Aspek Optatif

Dalam membangun negara, rakyat harus membantu tugas-tugas para pemerintah. Optatif: (Harapan atau keinginan).

### Aspek Organisasi

Adalah menggunakan organisasi itu sendiri sebagai wadah yang nantinya berangsur angsur akan membantu pelaksanaan tujuan yang hendak dicapai oleh negara ini.

### Aspek Kejiwaan

Aspek yang satu ini dimaksudkan agar kita semua sebagai rakyat Indonesia juga taat kepada peraturan yang ada dan memperkecil masalah yang dihadapi oleh negara ini,

# Isi Demokrasi Pancasila

## *Politik Demokrasi Pancasila*

Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.

1

2

Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan.

3

4

Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis.

Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, dan orang lain

5

6

Mewujudkan rasa keadilan sosial

Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 8. Menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional.

7





# Tujuan dan Fungsi Demokrasi Pancasila

## *Politik Demokrasi Pancasila*

- Tujuan demokrasi pancasila adalah untuk menyeimbangkan bagaimana bangsa Indonesia mengatur kehidupannya dan bagaimana cara untuk bersikap demokratis. Mengatur norma kesopanan supaya tidak terjadi adanya pelanggaran norma.
- Demokrasi pancasila memiliki banyak fungsi dalam pelaksanaannya terhadap negara Indonesia, macam-macam fungsi demokrasi pancasila ialah sebagai berikut:
  - Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan/perwusyawaratan
  - Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan/perwusyawaratan.
  - Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional.
  - Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila.
  - Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan seimbang mengenai lembaga negara.
  - Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab

# Sistem Demokrasi Pancasila

*Politik Demokrasi Pancasila*

Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung didalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut :

## Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan Hukum

Negara Indonesia berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya.

## Indonesia Menganut Sistem Konstitusional

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-Undang.



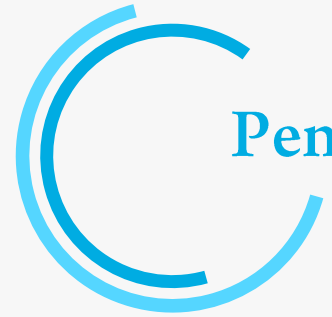
## Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Tetapi setelah Amandemen MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi , namun setara dengan lembaga lainnya



## Presiden

Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dibawah MPR Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh MPR juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.



## Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat yang dipegang oleh Presiden dan DPR harus saling bekerja sama



## Menteri Negara

Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada Presiden.



## Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diklator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.



# Nilai Demokrasi Pancasila

## *Politik Demokrasi Pancasila*

- Sebagai warga Negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
- Musyawarah untuk mencapai mufkat diliputi oleh semangat kekeluargaan
- Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang di capai sebagai hasil musyawarah.
- Keputusan yang di ambil harus bisa di pertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

# Sesi Tanya Jawab !

Ada Pertanyaan?

